

## Satu Bulan Pasca Kasus Pertama: Apa kabar, Indonesia?

Faradilla Rahma Sari  
Eka Wahyuni  
Rizqatus Sholehah

### Pertanyaan

*Bagaimana dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia hingga saat ini? Langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani Covid-19?*

### Konten

1. Update kondisi perekonomian pasca Covid-19 masuk Indonesia
2. Tentang “*flattening the curve*”
3. Langkah pemerintah untuk mengatasi Covid-19
4. Seputar *lockdown*
5. Pentingnya menggunakan masker

### Terkini: Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 memicu krisis multidimensi. Banyak negara telah memperkirakan pertumbuhan minus tahun ini, termasuk juga Indonesia. Selama wabah di tahun 2020, PDB Indonesia diperkirakan mencapai -0,4 persen s/d -0,5 persen.<sup>12</sup> Namun, selama periode pemulihan, PDB mungkin akan naik 0,7 persen. Secara umum, wabah ini dapat secara langsung berdampak pada perekonomian Indonesia melalui:

- 1) Ekspor yang lebih rendah,
- 2) Potensi keterlambatan dalam FDI
- 3) Pendapatan pariwisata yang lebih rendah

Secara keseluruhan, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai -0,5 persen; dengan ekspor akan turun paling banyak (-2 persen), diikuti oleh investasi (-0,6 persen) dan tingkat konsumsi yang lebih rendah (-0,1 persen). Di sisi sektoral beberapa sektor yang terkena dampak paling besar antara lain: Sektor hotel dan restoran melambat (-6,6 persen), Pertambangan (-6,5 persen), Manufaktur (-5,6 persen), Transportasi (-5,4 persen) dan Konstruksi (-2,5 persen).

<sup>1</sup> Dorimulu, P. 2020. TotalWar on Coronavirus. Jakarta: JakartaGlobe

<sup>2</sup> Ridho, L. 2020. Estimating the Impact of Coronavirus. *MacroInsight*:PT Indo Premier Sekuritas

Dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia adalah akibat besarnya aktivitas investasi dan perdagangan dengan Cina.<sup>2</sup>

## Ketenagakerjaan

Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk “bekerja dari rumah”. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau memperlambat penyebaran virus tersebut. Kebijakan tersebut ternyata berdampak pada tiga hal yaitu: *Pertama*, banyak pekerja tidak mampu bekerja dari rumah. *Kedua*, muncul bingung. *Ketiga*, perlu langkah-langkah darurat yang lebih tegas untuk mengekang penyebaran virus.

Secara garis besar, sekitar 55 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk menjalankan kebijakan “bekerja dari rumah”. Tidak ada pekerjaan berarti tidak ada gaji dan tidak ada jaring pengaman. Untuk sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) hal ini tentu akan sangat berdampak pada bisnis mereka.<sup>3</sup>

## Perdagangan Internasional

Selama dua dekade terakhir Cina berperan penting dalam kegiatan ekonomi global. Pada dasarnya, China dalam ekonomi global tidak hanya sebagai produsen dan eksportir saja, tetapi juga telah menjadi pemasok utama input perantara untuk perusahaan manufaktur di luar negeri. Sekitar 20 persen perdagangan produk-produk setengah jadi di pasar global dikontribusi oleh China. Bahkan secara lebih ekstrim dapat dikatakan bahwa ekspor negara mana pun akan tergantung pada seberapa bergantung industrinya terhadap pemasok China.<sup>4</sup>

Secara umum China adalah salah satu pemasok utama bahan baku dan barang modal untuk sektor manufaktur Indonesia. Indonesia mengimpor hampir 10 miliar dolar boiler, mesin-mesin dan peralatan mekanis lainnya dari China setiap tahun menurut United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Namun, adanya pengurangan pasokan input antara China, bersamaan dengan merebaknya Covid-19, Impor Indonesia dari Cina pada Januari 2020 sudah turun 4,6 persen dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Diperkirakan sektor perdagangan Indonesia mengalami sejumlah kontraksi. Lebih dari 495 jenis komoditas dengan tujuan ekspor China akan terimbas. Disisi lain sekitar 499 jenis barang impor dari China diperkirakan akan menyusut atau bahkan menghilang dari pasar Indonesia.<sup>6</sup> Sebagai contoh, pasokan barang-barang impor dari komponen otomotif dan kain tekstil untuk bagian-bagian mesin dan elektronik mulai terganggu, bahkan beberapa proyek investasi juga telah dihentikan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Samboh, E. 2020. Economics of partial lockdown to contain spread of coronavirus. Jakarta:Jakarta Post

<sup>4</sup> United Nation.2020. Global Trade Impact of The Coronavirus (COVID-19) epidemic. New York

<sup>5</sup> Nasori.2020. Indonesia Braces for Full Impact From Coronavirus Economic Fallout. Jakartaglobe. Online [\[https://jakartaglobe.id\]](https://jakartaglobe.id)

<sup>6</sup> Lipi. 2020. Dampak Virus Corona pada Laju Ekonomi Indonesia 2020. Jakarta: LIPI

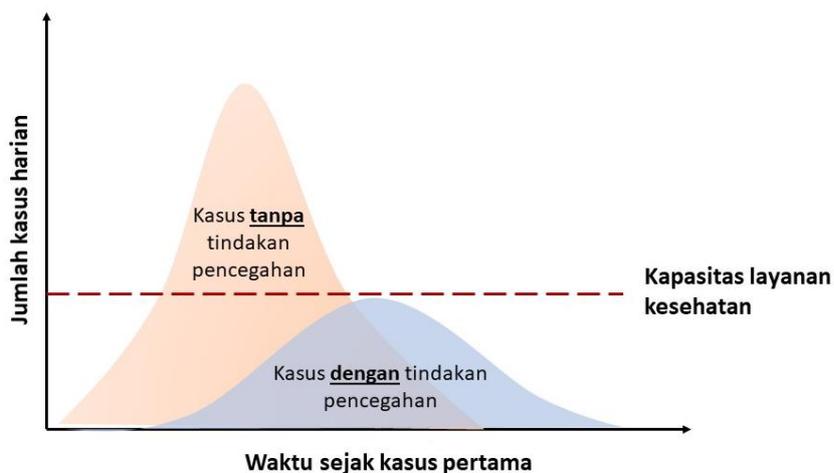
<sup>7</sup> Samboh, E. 2020. Indonesia can afford the coronavirus battle, but...Jakarta:The Jakarta Post

## Apa itu “flattening the curve”?

Hampir satu bulan setelah World Health Organization (WHO) mendeklarasikan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pasca peningkatan jumlah kasus yang signifikan di Cina, muncul sebuah grafik yang dinilai dapat menjelaskan pada masyarakat awam tentang pentingnya upaya untuk menghentikan penyebaran virus tersebut.

Grafik yang kemudian dikenal dengan nama “*flatten the curve graph*” tersebut pertama kali dimunculkan oleh Drew A. Harris, seorang analis kesehatan masyarakat dari Thomas Jefferson University di Philadelphia, yang mengadaptasi grafik pada paper berjudul *Interim pre-pandemic planning guidance: community strategy for pandemic influenza mitigation in the United States: early, targeted, layered use of nonpharmaceutical interventions* yang diterbitkan oleh CDC pada tahun 2007<sup>8</sup>. Grafik tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu jumlah kasus pada sumbu X, waktu sejak kasus pertama muncul pada sumbu Y, dan garis putus-putus yang menggambarkan kapasitas layanan kesehatan sebuah daerah, seperti jumlah *hospital bed* per kapita, jumlah dokter dan perawat per kapita, jumlah rumah sakit, dan sebagainya.

**Grafik 1. Kurva Perkembangan Kasus dalam Pandemi**



Dalam grafik sederhana tersebut (lihat **Grafik 1**), digambarkan bahwa jumlah kasus wabah Covid-19 akan meningkat tajam hanya dalam waktu singkat apabila tidak ada tindakan untuk mengatasi ataupun mencegah penyebarannya. Jumlah tersebut tentu akan jauh di atas kapasitas layanan kesehatan yang ada. Akibatnya, banyak sekali korban yang tidak akan bisa dirawat dengan layak atau bahkan tidak bisa mendapat layanan kesehatan. Namun, hal itu tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan kasus dapat diperlambat. Berdasarkan grafik tersebut, Harris menyampaikan bahwa kemungkinan yang dapat dilakukan hanyalah menekan laju pertumbuhan kasus dan menjaga agar stabil di bawah garis kapasitas layanan kesehatan, sehingga semua yang

<sup>8</sup> Robert, S. 2020. Flattening the Coronavirus Curve. The New York Times [<https://www.nytimes.com/article/flatten-curve-coronavirus.html>]

sakit akan dapat dirawat di rumah sakit dengan perawatan yang sesuai. Sejak saat itu, tagar #flattenthecurve mulai viral dan banyak digunakan dalam mensosialisasikan himbauan cuci tangan dan jaga jarak aman (*social distancing*).

Di sisi lain, konsep #flattenthecurve ternyata mengilhami negara-negara untuk berupaya menekan laju pertumbuhan kasus positif. Setiap negara menerapkan cara yang berbeda untuk mencapai tujuannya, contohnya dengan melakukan *lockdown*, *partial lockdown*, karantina (*quarantine*), isolasi individu (*self-isolation*), *social distancing*, dan bahkan *herd immunity*, baik dalam skala daerah maupun nasional.

**Herd immunity** adalah konsep epidemiologi dimana mayoritas penduduk sebuah negara dinilai memiliki imunitas yang cukup (baik karena vaksin maupun natural immunity) sehingga wabah tidak akan tersebar.

**Lockdown:** Sebuah protokol darurat yang melarang orang untuk keluar atau masuk ke suatu wilayah. Terdapat dua macam berdasarkan keketatannya, yaitu **partial lockdown** dan **full lockdown**.

**Quarantine:** Menjauhkan orang yang sehat tetapi ada kemungkinan terpapar virus, tujuannya adalah untuk mencegah mereka menularkan virus ke oranglain. Bisa dilakukan pemerintah, bisa juga himbauan untuk **self-quarantine**.

**Isolation:** Sama seperti karantina, tetapi untuk **orang yang sudah sakit**.

**Social distancing:** Menjauhi kerumunan dan menjaga jarak 2-meter antar individu.

## Langkah apa yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk melawan Covid-19?

Di Indonesia, berbagai pihak mulai masyarakat awam, aktivis, organisasi masyarakat, praktisi, peneliti, hingga beberapa pemerintah daerah sudah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menetapkan *lockdown* berbarengan dengan terus meningkatnya jumlah orang yang positif Covid-19. Namun, presiden tidak mau mengambil langkah tersebut dan lebih memilih metode *social distancing*. Masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan diri, membiasakan mencuci tangan dengan baik, dan sebisa mungkin menghindari keramaian.

Presiden tidak berubah pikiran meskipun jumlah orang positif Covid-19 naik dua kali lipat per 24 Maret 2020, dibanding sehari sebelumnya. Beliau menyatakan bahwa melalui pertimbangan yang matang berdasarkan karakteristik masyarakat, bukti yang telah dialami serta dilakukan oleh negara lain, langkah yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah *social distancing* atau *physical distancing*. Disamping itu, langkah tersebut dipilih agar aktivitas ekonomi tetap berjalan<sup>9</sup>.

Covid-19 ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib ditanggulangi sesuai dengan ketentuan per tanggal 31

<sup>9</sup> Ihsanuddin. 2020. *Jokowi: Physical Distancing Paling Pas untuk Cegah Covid-19 di Indonesia*. Kompas [<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/12054741/jokowi-physical-distancing-paling-pas-untuk-cegah-covid-19-di-indonesia>]

Maret 2020 melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pada waktu yang sama, penegasan terkait penerapan metode *social distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan PSBB menjadi kewenangan Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan data statistik harian dari Kawal Covid-19, DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak di Indonesia. Per tanggal 2 April, kasus Covid-19 di provinsi tersebut mencapai 855 orang atau 47% dari total kasus positif Covid-19 di Indonesia. Artinya, daerah ini bisa saja menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia. Maka dari itu, Gubernur Anies Baswedan meminta Menkes Terawan Agus Putranto untuk segera menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta.

PSBB resmi diterapkan di DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020. Berdasarkan pedoman penerapan PSBB yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, mobilitas masyarakat dibatasi secara drastis meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja kecuali aktivitas perekonomian, pelayanan keuangan, komunikasi, distribusi logistik, pelayanan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar minyak (BBM) dan gas, pelayanan kesehatan, serta keutuhan dasar lainnya. Selain itu, dilakukan juga pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, serta pembatasan moda transportasi. Dalam ketiga hal ini, yang dibatasi adalah jumlah dan jarak antar individu misalnya pada moda transportasi jumlah dan jarak antar penumpang diberi batasan. Aktivitas transportasi lainnya, terutama yang berhubungan dengan distribusi barang, masih bisa berjalan seperti biasa.

## Apakah *lockdown* adalah kunci keberhasilan mengatasi wabah ini?

Setiap negara memiliki prosedur masing-masing dalam melaksanakan kebijakan *lockdown*, sehingga tingkat keberhasilannya pun beragam.

**Cina** adalah pertama yang menerapkan kebijakan *lockdown*<sup>10</sup>. Sekitar 24 hari setelah kasus pertama muncul, Pemerintah Cina menutup akses transportasi masal untuk keluar dan masuk Kota Wuhan. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk transportasi pribadi maupun transportasi darurat medis. ***Lockdown* dilakukan secara bertahap**, mulai dari meminimalisir mobilitas masyarakat hingga melakukan karantina penuh. 76 hari berlalu, laju penambahan kasus positif Covid-19 stabil menurun.

---

<sup>10</sup> Taylor, D, B. 2020. *A Timeline of the Coronavirus Pandemic*. The New York Times [<https://www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html>]

Akhirnya Pemerintah Cina memutuskan untuk mengakhiri masa *lockdown* pada tanggal 28 Maret 2020.

Keberhasilan Cina membuat negara-negara lain memilih untuk menerapkan kebijakan yang sama setelah mengalami peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan, misalnya negara Italia, Perancis, dan India. Ketiga negara tersebut menerapkan *lockdown* untuk seluruh wilayah negaranya. Tentunya, semua memiliki cara yang berbeda untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Giuseppe Conte, Perdana Menteri **Italia**, resmi memberlakukan *lockdown* tingkat nasional pada 9 Maret 2020 setelah sebelumnya sudah lebih dulu menerapkannya di zona merah Provinsi Lodi pada 21 Februari 2020<sup>11</sup>. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Conte melibatkan polisi dan menaikkan denda dari €206 menjadi €400 hingga €3.000 bagi masyarakat yang melanggar aturan sejak Italia menjadi negara dengan kasus kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia. Masyarakat dilarang untuk mengadakan acara publik dan berpergian kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar, seluruh kegiatan bisnis dan industri yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dasar ditutup, serta sekolah dan universitas diliburkan.

Presiden **Perancis**, Emmanuel Macron, menerapkan kebijakan *lockdown* pada 17 Maret 2020 atau sekitar 3 bulan setelah kasus pertama muncul<sup>12</sup>. Masyarakat diminta untuk diam di rumah dan hanya boleh keluar untuk membeli kebutuhan hidup, mengunjungi layanan kesehatan dan toko obat, serta berolahraga yang dilakukan secara individu seperti *jogging*. Mereka harus mengisi formulir dan dicatat oleh polisi yang berjaga di masing-masing kawasan tempat tinggal penduduk. Untuk mengantisipasi masyarakat yang nakal, Perancis mengerahkan 100.000 polisi untuk berjaga dan patroli, serta memberikan sanksi denda sebesar €38 hingga €135 bagi masyarakat yang melanggar. Denda tersebut akan bertambah apabila masyarakat terus melanggar.

Di **India**, Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan untuk melakukan *lockdown* yang rencanya akan selama 21 hari sejak tanggal 24 Maret 2020.<sup>13</sup> Saat itu, jumlah kasus positif Covid-19 di India sudah mencapai 500 orang, sejak kasus pertama muncul tanggal 30 Januari 2020. Mengingat India adalah negara berkembang dengan 25% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, PM Modi mengatakan bahwa akan memberikan bantuan khusus berupa bantuan langsung tunai (*direct cash transfers*) dan paket makanan untuk mereka. Semua layanan publik dan transportasi diberhentikan total. Seluruh yang melanggar aturan *lockdown* akan dihukum.

<sup>11</sup> Lawler, D. 2020. *Timeline: How Italy's Coronavirus Crisis Became the World's Deadliest*. Axios

[<https://www.axios.com/italy-coronavirus-timeline-lockdown-deaths-cases-2adb0fc7-6ab5-4b7c-9a55-bc6897494dc6.html>]

<sup>12</sup> The local. 2020. *Explained: These are the Rules of Lockdown in France*. [<https://www.thelocal.fr/20200324/explained-these-are-frances-new-coronavirus-rules>]

<sup>13</sup> Tripathi, R. *As India Goes Into Lockdown Mode, What's Allowed Where*. The Economic Times

[<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/as-india-goes-into-lockdown-mode-whats-allowed-where/lockdown-rules/slideshow/74825307.cms>]

## Namun...

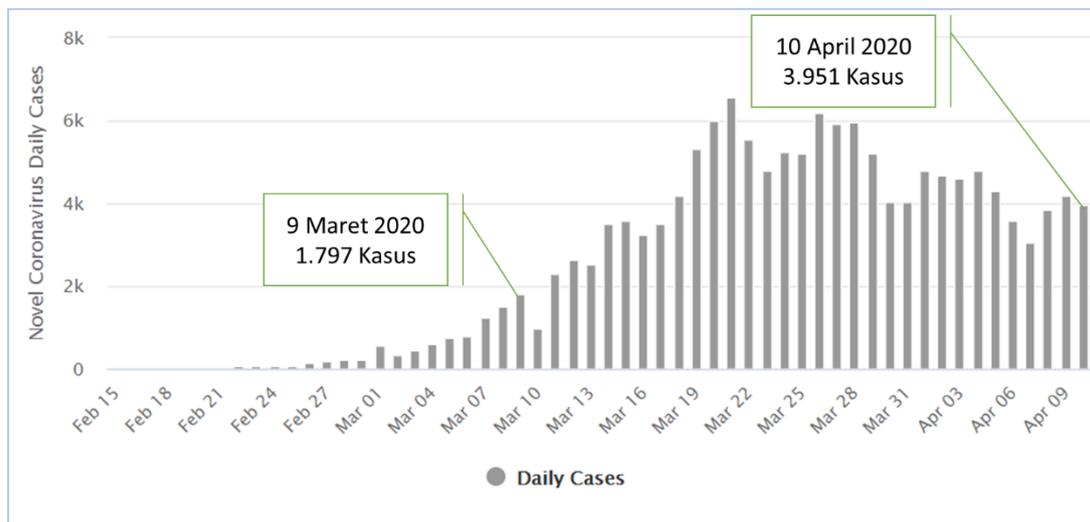
Meski sama-sama memilih *lockdown* guna memperlambat laju penyebaran virus Covid-19, tidak semua negara mengalami pengalaman yang baik. Tidak sedikit hal buruk yang terjadi di beberapa negeri yang menerapkan *lockdown*, seperti penurunan laju pertumbuhan kasus yang cenderung lama hingga terjadi kerusuhan, kejahatan meningkat, kelaparan, dan banyak orang meninggal.

Di Perancis, 350.000 orang telah dihukum akibat melanggar aturan *lockdown*<sup>14</sup>, banyak penipuan yang mengatasnamakan sumbangan untuk tenaga medis<sup>15</sup>, muncul polisi palsu yang justru melakukan kekerasan pada masyarakat sipil<sup>16</sup>, perampokan meningkat terutama di supermarket dan apotek. Bahkan, ada kasus pencurian batu antik dari Katedral Notre Dame<sup>17</sup>.

Di India, sekitar 325 juta penduduknya yang miskin dan bekerja di sektor informal menderita sebab tidak lagi dapat bekerja untuk mendapat uang sejak diterapkannya *lockdown*. Tidak lama, mereka memilih untuk eksodus kembali ke desa dengan berjalan kaki karena seluruh layanan transportasi dihentikan<sup>18</sup>. Akibatnya, tidak sedikit terjadi kelaparan hingga kematian sepanjang perjalanan.

Di sisi lain, pertumbuhan kasus positif Covid-19 di ketiga negara tersebut masih cenderung tinggi dan meningkat drastis jika dibandingkan pertumbuhan kasus saat pertama diterapkan *lockdown* (lihat **Gambar 1**, **Gambar 2**, dan **Gambar 3**).

**Gambar 1. Pertambahan Kasus Harian di Italia**



Sumber: worldometers

<sup>14</sup> McGuinness, R. 2020. *Emmanuel Macron Chaos: More than 350,000 Break France Lockdown Laws as Death Toll Soars*. Express [<https://www.express.co.uk/news/world/1263887/france-coronavirus-emmanuel-macron-covid-19-paris-lockdown>]

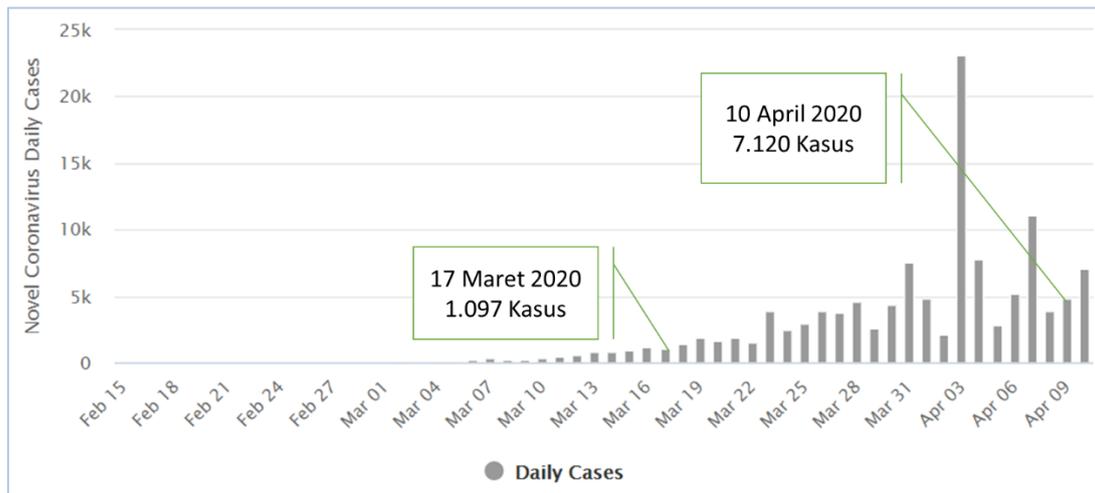
<sup>15</sup> The Local. *Public in France Warned Over Fake Police Stops and Other Coronavirus Scams* [<https://www.thelocal.fr/20200326/warning-over-fake-police-stops-and-coronavirus-scams>]

<sup>16</sup> Ramdani, N. 2020. *Coronavirus Lockdown in France Leads to the Brutalisation of Minorities*. [<https://www.trtworld.com/opinion/coronavirus-lockdown-in-france-leads-to-the-brutalisation-of-minorities-34828>]

<sup>17</sup> Cowie, A. 2020. *Thieves Attack Notre-Dame During Paris Lockdown*. [<https://www.ancient-origins.net/news-general/notre-dame-thieves-0013472>]

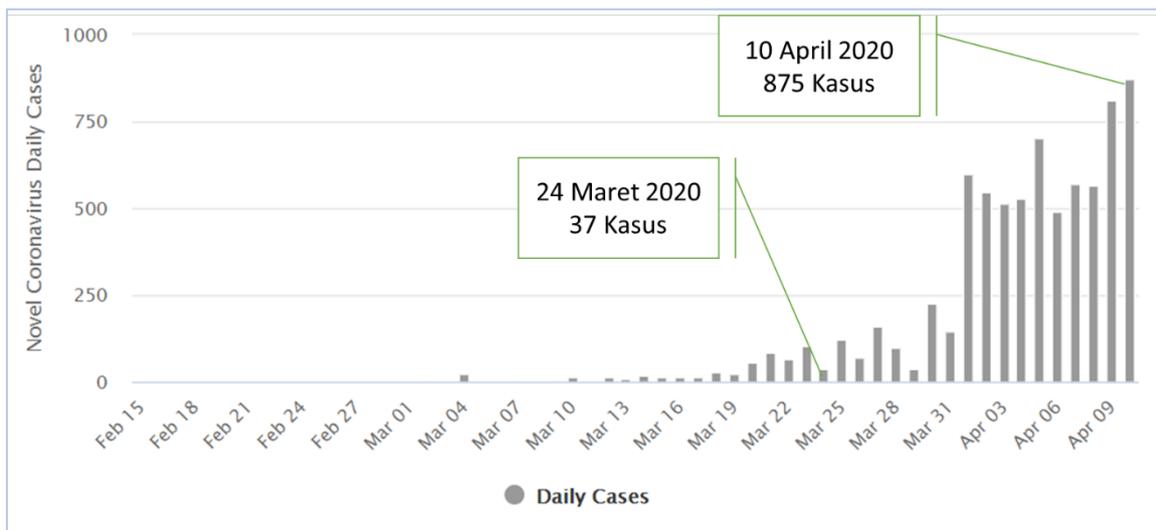
<sup>18</sup> Kidangoor, A. 2020. *Modi's Hasty Coronavirus Lockdown of India Leaves Many Fearful for What Comes Next*. [<https://time.com/5812394/india-coronavirus-lockdown-modi/>]

**Gambar 2. Pertambahan Kasus Harian di Perancis**



Sumber: worldometers

**Gambar 3. Pertambahan Kasus Harian di India**



Sumber: worldometers

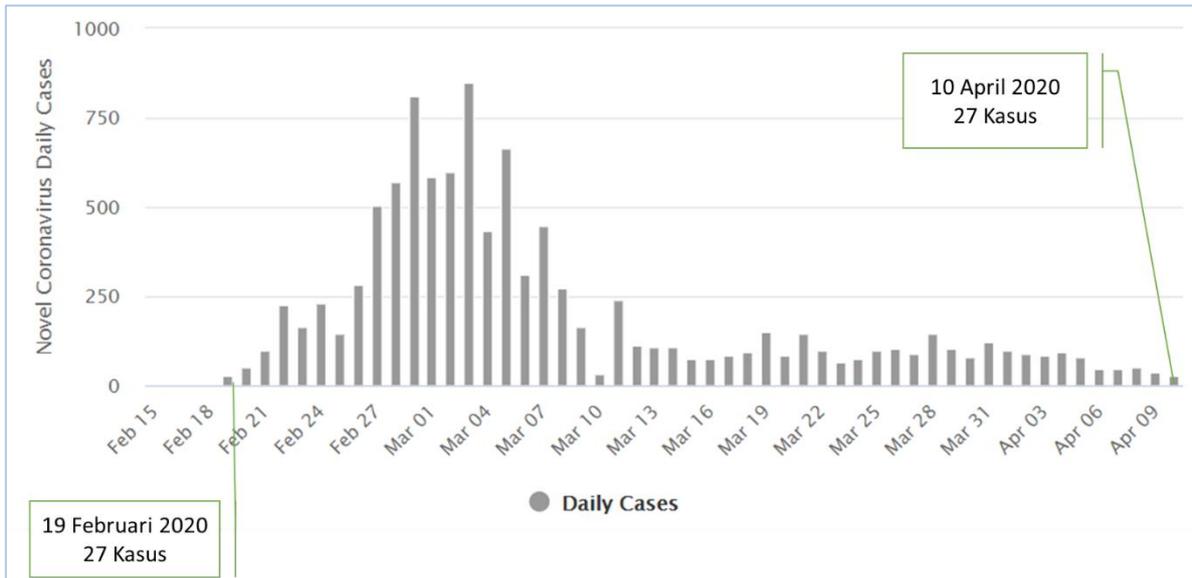
## Apa ada negara yang berhasil *flatten the curve* meski tanpa menerapkan *lockdown*?

Menghadapi virus Covid-19 tanpa melakukan *lockdown* bukan suatu yang mustahil. Korea Selatan telah menjadi bukti bahwa tidak perlu *lockdown* untuk *flatten the curve*. Negara yang dipimpin oleh Presiden Moon Jae In tersebut punya empat aktivitas kunci yang membuatnya berhasil. **Pertama**, melakukan tes Covid-19 kepada masyarakat secara masal dan gratis. Bahkan, pemerintah membangun tempat-tempat tes baru yang dapat dikunjungi secara *drive-thru*. Pasalnya, layanan tes Covid-19 yang dibuka oleh pemerintah Korea Selatan memiliki kapasitas hingga 20 ribu tes per hari dan hanya membutuhkan waktu 6 jam untuk hasilnya. **Kedua**, menerapkan *social distancing* yaitu menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi keramaian, dan menunda pertemuan yang melibatkan banyak orang. **Ketiga**,

meningkatkan kapasitas layanan kesehatan seperti ventilator dan jumlah tempat tidur di rumah sakit, serta memberikan peralatan perlindungan diri yang memadai untuk paramedis. **Keempat**, koordinasi, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi untuk pengawasan. Contohnya, menggunakan jaringan GPS dari ponsel pribadi untuk memantau mobilitas dan lokasi pasien dan Orang Dalam Pantauan (ODP).

Per tanggal 10 April 2020, Korea Selatan telah mampu menurunkan dan menjaga kurva pertumbuhan kasus di angka yang sangat rendah (lihat **Gambar 4**).

**Gambar 4. Pertambahan Kasus Harian di Korea Selatan**



Sumber: worldometers

Adanya bukti dari Korea Selatan membuat para ahli menilai bahwa langkah yang tepat dan sebaiknya ada dalam upaya pemerintah untuk menangani penyebaran Covid-19 adalah **tes masal** dan **meningkatkan kapasitas layanan kesehatan**. Jadi, mengacu pada **Grafik 1**, pemerintah juga dapat *rise the bar* disamping upaya untuk *flatten the curve*. Kombinasi langkah tersebut bahkan bisa membuat negara tidak perlu melakukan *lockdown* sehingga aktivitas ekonomi masih bisa berjalan.

## Apa penyebab tidak efektifnya langkah pemerintah dalam menghadapi pandemik Covid-19?

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di beberapa negara diatas, terdapat beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan apabila akan menerapkan kebijakan *lockdown*. **Pertama** adalah aspek kecepatan respon pemerintah. Kecepatan respon pemerintah bisa menjadi penentu keberhasilan dalam menghentikan penyebaran wabah. **Kedua** adalah aspek kematangan perencanaan dan koordinasi lintas sektor pusat dan daerah. **Ketiga** adalah kebijakan lain yang mendukung. **Keempat** adalah memperhatikan karakteristik masyarakat untuk menetapkan kebijakan dan cara sosialisasi yang tepat. **Kelima** adalah komunikasi yang efektif dan transparansi dari pihak pemerintah. Kombinasi lima poin tersebut menjadi kunci efektif atau tidaknya langkah yang diambil oleh pemerintah.

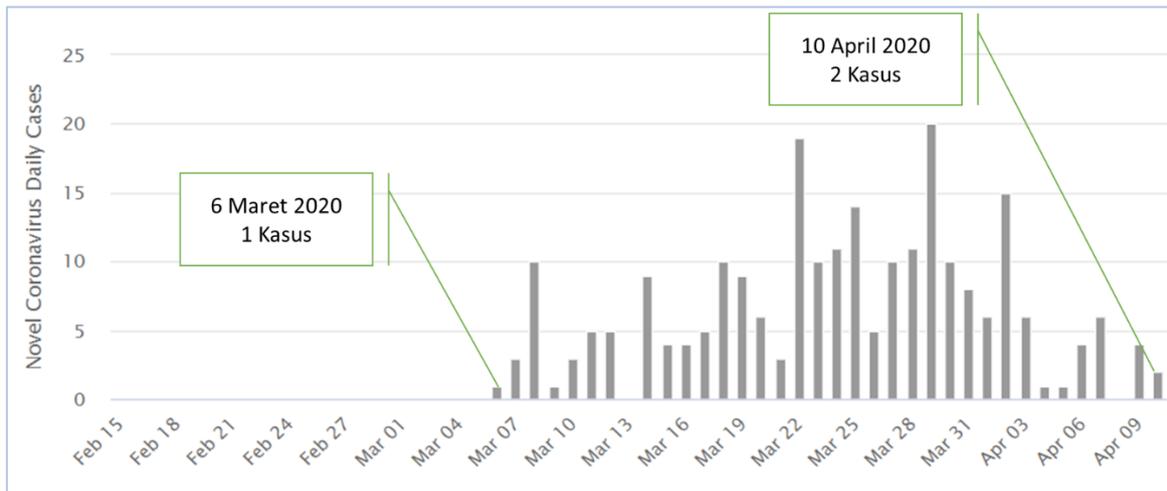
Jika dibandingkan dengan Italia, Perancis, dan India yang rata-rata baru menerapkan *lockdown* pada satu hingga tiga bulan pasca kasus pertama muncul, Cina terbilang lebih cepat. Negara tersebut melakukan *lockdown* pada hari ke-12 pasca ilmuwan menemukan bahwa virus tersebut dapat menular dari manusia ke manusia.

Cina tidak melakukan *lockdown* secara radikal dan spontan, melainkan secara bertahap. Awal diterapkan *lockdown*, aturan masih relatif longgar dan masyarakat masih boleh berpergian untuk membeli kebutuhan. Lalu, mulai dihimbau untuk tinggal di rumah dan *self-isolation*. Taksi masih boleh beroperasi, tetapi jumlahnya dikurangi. Hari kedua, taksi dan seluruh jenis kendaraan lain sudah tidak boleh beroperasi kecuali jasa layanan pengantaran makanan.

Pada awal Februari, aturan mulai diperketat. Hanya satu anggota keluarga yang boleh keluar untuk membeli kebutuhan hidup, sekali dalam seminggu. Akhirnya pada tahap terakhir dilakukan *lockdown* total, kebutuhan sayur mayur disuplai oleh pemerintah sedangkan kebutuhan lain hanya boleh dibelanjakan melalui *volunteer* yang telah disediakan.

Disamping Cina, Vietnam menjadi contoh yang baik tentang kecepatan respon pemerintah. Negara berkembang tersebut mampu mengantisipasi tingkat persebaran virus dan jumlah kematian akibat Covid-19. Dua kasus pertama muncul pada tanggal 23 Januari 2020, sedangkan 6 kasus selanjutnya baru muncul pada tanggal 2 Februari 2020. Berdasarkan data pertambahan kasus harian dari *worldometers*, pertambahan kasus Covid-19 di Vietnam relatif rendah yaitu berkisar antara satu hingga 20 kasus per hari (lihat **Gambar 5**). Capaian tersebut adalah hasil dari Pemerintah Vietnam yang tanggap.

**Gambar 5. Pertambahan Kasus Harian di Vietnam**



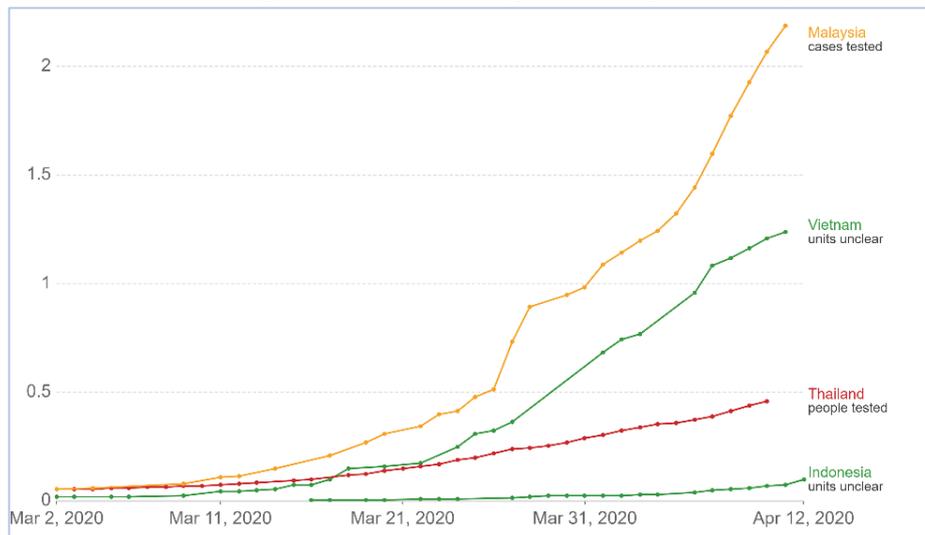
Sumber: worldometers

Pemerintah negara tersebut sangat paham apabila mereka tidak punya cukup sumber daya untuk menghadapi wabah COVID-19, sehingga mereka harus bergerak sedini mungkin untuk melakukan tindakan preventif.

Sejak kasus pertama Covid-19 di Cina diumumkan, Pemerintah Vietnam telah membentuk badan khusus untuk menyiapkan *risk assessment* dan menyusun rencana penanganan wabah<sup>19</sup>. Maka dari itu, setelah enam orang dinyatakan positif Covid-19 di negaranya, pemerintah telah siap dan tahu yang harus dilakukan. Vietnam menutup jalur penerbangan dari Cina, menolak pengajuan visa, mengkarantina ribuan orang, dan menutup seluruh sekolah. Beberapa minggu selanjutnya, pemerintah melakukan penelusuran menggunakan aplikasi yang telah mereka buat pada orang-orang yang kemungkinan berhubungan dengan pasien pertama.

Vietnam dapat melakukan tes Covid-19 dalam jumlah besar karena pemerintah telah meminta pabrik-pabrik lokal untuk memproduksi 10.000 alat tes per hari. Di ASEAN, tingkat tes Covid-19 negara Vietnam relatif lebih tinggi daripada Indonesia (lihat **Grafik 2**). Hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk segera mengetahui pasien positif dan secepat mungkin melakukan isolasi, sehingga virus tidak menyebar dengan luas.

**Grafik 2. Tingkat Tes Covid-19 (per 1.000 penduduk)**



Sumber: *Ourworldindata*

Murut Park Kidong, perwakilan WHO di Hanoi, kunci kesuksesan Vietnam yaitu melakukan persiapan selama belum muncul kasus (*peacetime*), respon sedini mungkin, dan pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat dibawah kepemimpinan yang kuat.<sup>20</sup>

Memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan latarbelakang masyarakat juga menjadi poin penting. Pasalnya, salah satu faktor munculnya *chaos* pada masa *lockdown* di India karena pemerintah belum dapat mengantisipasi respon dari masyarakat kelas marjinal. Mayoritas penduduk India bekerja di sektor informal yang pada umumnya menerapkan upah harian, sekitar 25% penduduk India masih

<sup>19</sup> Reed, J. 2020. *Vietnam's Coronavirus Offensive Wins Praise for Low-Cost Model*. [<https://www.ft.com/content/0cc3c956-6cb2-11ea-89df-41bea055720b>]

<sup>20</sup> Juan, E.S. 2020. *How Vietnam Has Been Winning Its War Against Covid-19*. [<https://www.laprensalatina.com/how-vietnam-has-been-winning-its-war-against-covid-19/>]

memiliki tingkat literasi yang rendah, sedangkan bantuan pemerintah dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing keluarga. Maka dari itu, terjadi hal yang belum diantisipasi oleh pemerintah seperti eksodus dari kota ke desa, masyarakat kelaparan, hingga kematian.

Karakteristik masyarakat juga penting untuk dijadikan pedoman dalam menentukan metode komunikasi yang tepat untuk mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan wabah Covid-19. Sebab, bukan tidak mungkin akan timbul kekacauan apabila pemerintah salah langkah dalam mengkomunikasikan kebijakan atau informasi terkini. Misalnya, terjadi *panic buying* yang menyebabkan stok makanan di supermarket habis. Bahkan, masyarakat bisa berlaku sebaliknya dan menjadi tidak peduli dengan himbuan pemerintah karena belum paham tingka bahaya dan keseriusan wabah.

Salah satu contoh komunikasi pemerintah yang baik adalah yang dilakukan oleh **Selandia Baru**. Dimana Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, menegaskan bahwa seluruh masyarakat bertanggung jawab atas negara dan aksi yang mereka lakukan sudah pasti akan berpengaruh pada keamanan masyarakat. Ardern mengatakan pada setiap pidatonya agar setiap individu mengandaikan dirinya adalah pembawa virus, sehingga akan muncul kesadaran diri untuk sebisa mungkin menjaga agar tidak berkerumun di masyarakat atau bertindak seenaknya.

## Pakai masker, nggak?

Sejumlah negara merasakan adanya peningkatan serta penurunan jumlah kasus yang diakibatkan oleh virus yang mudah menular itu. Di Indonesia sendiri sampai tanggal 9 April 2020 tercatat jumlah angka kasus positif Covid-19 mencapai 3.293 orang dengan jumlah pasien yang sembuh sebesar 252 orang dan pasien yang meninggal sebanyak 280 orang. Setiap negara telah melakukan berbagai macam cara untuk mencegah ataupun mengurangi penyebaran virus ini.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 6 April 2020, Presiden Jokowi menghimbau semua masyarakat Indonesia untuk memakai masker ketika keluar rumah guna mencegah virus Covid-19. **Awalnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan penggunaan masker hanya untuk pasien Covid-19, perawat yang sedang mengasuh pasien, dan tenaga medis. Namun, kini WHO mendukung keputusan pemerintah suatu negara terkait penggunaan masker di ruang publik. Perubahan sikap WHO ini didasarkan dari hasil penelitian yang mengungkap efek positif pemakaian masker dalam mencegah penularan virus Covid-19.**

Salah satu negara yang awalnya tidak menerapkan penggunaan masker di ruang publik adalah Amerika Serikat. Namun, menjelang April 2020 *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* merekomendasikan masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan masker di ruang publik. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penggunaan masker diantaranya adalah (1) sifat virus Covid-19 yang sangat mudah menular, (2) besarnya potensi penularan dari kasus *asymptomatic* (tanpa gejala), dan

(3) bukti empiris dari Asia yang mampu mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dengan menerapkan himbauan wajib penggunaan masker<sup>21</sup>.

Negara di wilayah Asia seperti Cina, Korea Selatan, ataupun Jepang lebih dulu mewajibkan warganya untuk selalu menggunakan masker di ruang publik jika dibandingkan dengan negara barat seperti Eropa, Amerika Serikat, ataupun Australia. Di China, Hong Kong, Jepang, Thailand dan Taiwan, masyarakat berasumsi bahwa setiap orang bisa saja menjadi pembawa virus, bahkan orang yang terlihat sehat sekalipun. Bahkan di beberapa wilayah China, seseorang yang tidak mengenakan masker bisa ditahan dan juga dikenai hukuman. Jika dilihat dari sejarahnya, wilayah di Asia terutama di Hongkong pandemi Covid-19 ini mengingatkan mereka pada wabah virus SARS tahun 2003 yang mengakibatkan angka kematian yang tinggi akibat virus tersebut. Berbeda dengan negara di wilayah barat seperti Eropa ataupun Amerika, dimana pemakaian masker bukan bagian dari norma dan tidak adanya hukuman bagi warganya yang tidak memakai masker.

Berkaca dari kasus Covid-19 di Islandia yang mengungkapkan 50 persen kasus positif tidak menunjukkan gejala. Sebuah studi kasus yang baru-baru ini diterbitkan di China menemukan bahwa "kasus infeksi yang tidak dilaporkan", atau yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, sangat menular dan dapat menyebabkan hampir 80% kasus virus positif. Menurut data pemerintah China yang dilaporkan oleh *South China Morning Post*, diperkirakan sepertiga dari semua kasus positif di China adalah kasus *asymptomatic* atau kasus yang tidak menunjukkan gejala. Kasus *asymptomatic* ini yang menjadi dasar himbauan penggunaan masker untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Jika dilihat dari jumlah kasus positif antar negara di dunia, negara yang dengan kasus terbanyak saat ini berada di wilayah Amerika dan Eropa. Saat ini wilayah Asia, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang berhasil menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. Memang terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi penurunan kasus positif Covid-19. Namun, pencegahan lewat pemakaian masker menjadi salah satu strategi dalam pencegahan penularan virus Covid-19, terutama pada kasus tanpa gejala. Menurut George Dao, direktur jenderal dari *Chinese Center for Disease Control and Prevention* (CDC) kesalahan besar dari Amerika Serikat dan Eropa dalam penanganan Covid-19 adalah tidak adanya himbauan untuk menggunakan masker. Virus ini ditularkan melalui tetesan dan kontak dekat. Tetesan memainkan peran yang sangat penting karena ketika seseorang berbicara, selalu ada tetesan yang keluar dari mulut seseorang tersebut. Selain itu, banyak orang yang mengalami infeksi tanpa gejala. Jika mereka mengenakan masker wajah, maka hal itu dapat mencegah tetesan yang membawa virus itu dalam menginfeksi orang lain<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> University of California San Francisco. 2020. *Should I Wear a Mask to Protect Against the Coronavirus?*.

[<https://www.ucsfhealth.org/education/should-i-wear-a-mask-to-protect-against-the-coronavirus>]

<sup>21</sup> Cohen, J. 2020. *Not Wearing Masks to Protect Against Coronavirus is a 'Big Mistake', top Chinese Scientist Says*.

[<https://www.sciencemag.org/news/2020/03/not-wearing-masks-protect-against-coronavirus-big-mistake-top-chinese-scientist-says>]